

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM)

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara, didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 maret 1994, kemudian di ubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 21 juli 2001 dan dengan adanya Modernisasi di lingkungan DJP. Maka sejak tanggal 27 mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), yang akan melayani PPh, PPN, PBB, BPHTB serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan. Dengan di adakannya modernisasi perpajakan oleh pihak Kementrian Keuangan maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan tidak lagi memungut PBB dan BPHTB.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

B. Visi dan Misi KPP Pratama Medan Belawan

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan DJP, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai DJP. Tetapi lebih jauh dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktik – praktik “*good governance*” pada institusi pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Dalam rangka mensosialisasikan sasaran pencapaian

penerimaan pajak, diperlukan sarana pendukung yang harus di persiapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan secara lebih handal. Beberapa sarana pendukung tersebut antara lain adalah peningkatan etika dan moral aparat, penyempurnaan bank data, penyusunan strategi yang tepat, peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga yang terkait dan perbaikan sistem informasi yang akurat.

2. Misi

Yang menjadi misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan adalah sebagai berikut :

a. Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang – undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi.

b. Ekonomi

Mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang meminimalkan distorsi.

c. Politik

Mendukung proses demokratisasi bangsa.

d. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

C. Wilayah Kerja KPP Pratama Medan Belawan

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan terdiri dari 4 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Medan Labuhan
2. Kecamatan Medan Marelan
3. Kecamatan Medan Deli
4. Kecamatan Medan Belawan.

D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas KPP Pratama Medan Belawan

1. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan

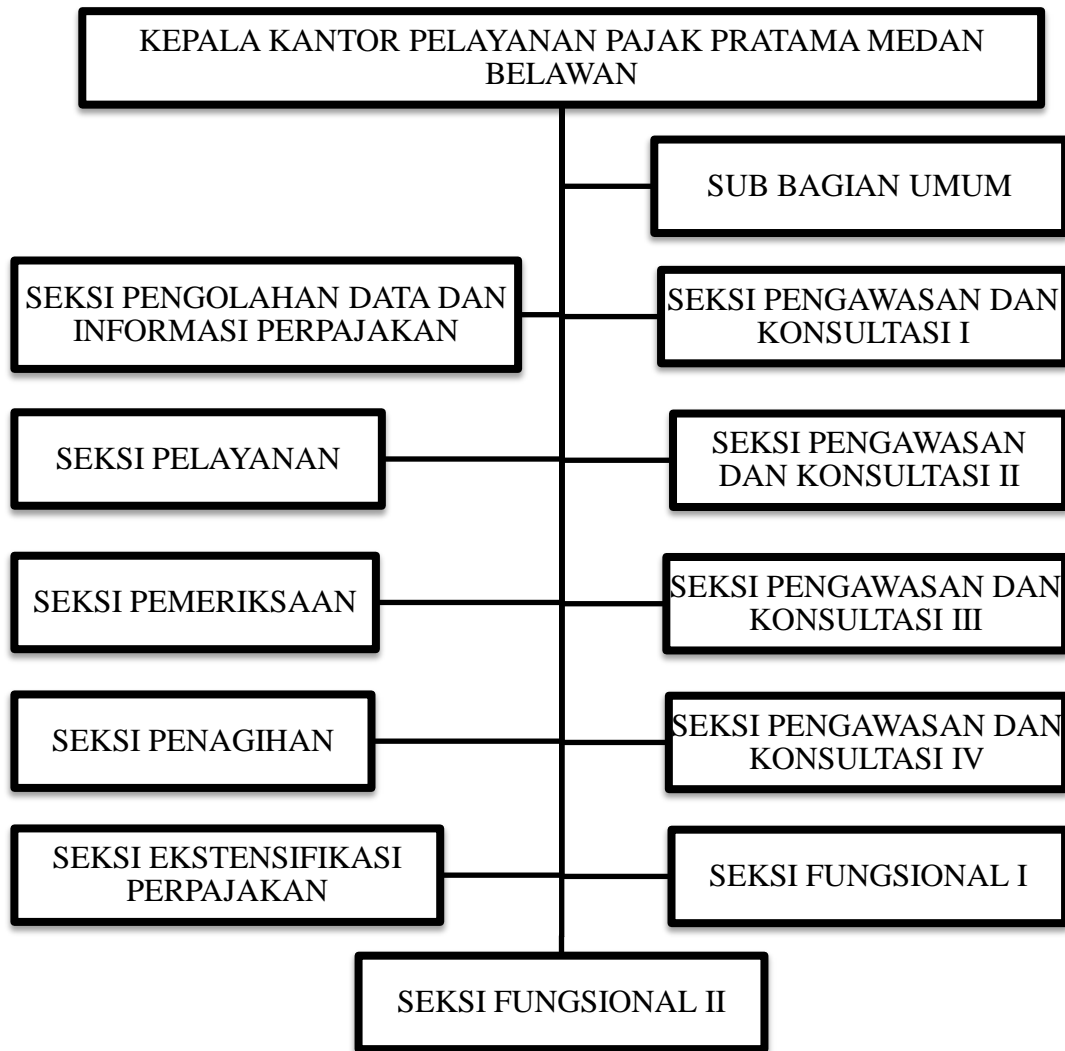
Di setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk menggambarkan secara jelas unsur-unsur yang membantu pimpinan dalam menjalankan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dapat diketahui posisi, tugas, dan wewenang setiap anggota. Tujuannya adalah untuk pencapaian kerja dalam organisasi yang berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab.

Jenis struktur organisasi yang digunakan oleh KPP Pratama Medan Belawan adalah menggunakan jenis struktur “*line and staff organization*” atau gabungan dari

jenis struktur organisasi garis dan organisasi fungsional. Struktur organisasi KPP Pratama Medan Belawan berdasarkan fungsi bukan jenis pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dipimpin oleh seorang kepala, yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak. Organisasi yang berada di KPP Pratama Medan Belawan bertujuan untuk membina keharmonisan kerja agar pekerjaan dapat terlaksana dengan teratur dan penuh tanggung jawab, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang baik dan maksimal.

Berikut struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan:



2. Uraian Tugas KPP Pratama Medan Belawan

2.1. Kepala KPP (Kepala Kantor)

Tugas Kepala KPP:

- a. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategi kantor wilayah
- b. Mengkoordinasi penyusunan rencana pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu
- c. Mengkoordinasi pelaksanaan tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) sesuai arahan kepala kantor wilayah.
- d. Mengkoordinasi rencana pencarian data strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- e. Mengkoordinasi pengolahan data yang sumber datanya strategis dan potensial dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.
- f. Mengkoordinasi pembuatan risalah perincian dasar pengenaan pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan wajib pajak berdasarkan hasil penghitungan ketetapan pajak.
- g. Mengkoordinasi pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan, mengkoordinasi penyusunan monografi perpajakan, mengkoordinasi pemantauan pelaporan dan pembayaran masa dan tahunan PPh dan pembayaran masa PPN/PPnBM dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.2. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga kantor.

Tugas Kepala Sub Bagian Umum:

- a. Pelaksanaan tugas di bidang administrasi penerimaan pengiriman surat – surat serta pelaksanaan tugas bendaharawan.
- b. Mendistribusikan surat – surat masuk kepada seksi yang bersangkutan dan pengiriman surat- surat keluar kepada instansi yang terkait.
- c. Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas bendaharawan rutin.
- d. Memberi nasehat dan menegakkan disiplin kepada pegawai.
- e. Memberi penilaian atas pelaksanaan pekerjaan pegawai.

2.3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Tugas Seksi PDI :

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data perpajakan.
- b. Penyajian informasi perpajakan.
- c. Perekaman dokumen perpajakan.
- d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- e. Pelayanan dukungan teknis komputer.
- f. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling.
- g. Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan kinerja.

2.4. Seksi Pelayanan

Tugas Seksi Pelayanan :

- a. Menetapkan penerbitan produk hukum perpajakan.
- b. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan.
- c. Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan (SPT) serta penerimaan surat lainnya.
- d. Memberikan penyuluhan perpajakan.
- e. Melaksanakan registrasi wajib pajak.
- f. Memungut fiskal luar negeri di pelabuhan Belawan.

2.5. Seksi Penagihan

Tugas Seksi Penagihan:

- a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, memproses permohonan pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.
- b. Melakukan Penerbitan Surat Tagihan, Surat Paksa, Surat Perintah melakukan penyitaan.
- c. Melakukan Penyitaan, usulan lelang dan Penagihan lainnya.

Di seksi penagihan terdapat beberapa orang Juru Sita Pajak yang telah mendapat pendidikan khusus berkaitan dengan penagihan dan penyitaan pajak.

Adapun tugas Juru Sita Pajak :

1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS).
2. Memberitahukan Surat Paksa

3. Melaksanakan penyitaan barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan (SPMP).
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

Juru Sita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus memakai pakaian Juru Sita Pajak dan memperlihatkan kartu tanda pengenal kepada penanggung pajak .

2.6. Seksi Pemeriksaan

Tugas Seksi Pemeriksaan:

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- c. Penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

2.7. Seksi Ekstensifikasi

Tugas Seksi Ekstensifikasi :

- a. Melakukan pengamatan dan penggalian potensi perpajakan.
- b. Pendataan obyek dan subyek pajak.
- c. Penilaian objek pajak dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

2.8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Tugas Seksi Pengawasan dan Konsultasi :

- a. Melakukan Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak terdaftar.

- b. Memberikan Bimbingan / himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
- c. Penyusunan Profil wajib pajak.
- d. Menganalisis kinerja wajib pajak.
- e. Melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil keputusan banding.

Pada pelaksanaannya, wilayah kerja keempat seksi pengawasan dan konsultasi dibagi berdasarkan domisili / tempat tinggal / wilayah tempat wajib pajak terdaftar.

1. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (WASKON I)

Kasi : Margono

- Kelurahan Kampung Besar.
- Kelurahan Martubung.
- Kelurahan Sei Mati
- Kelurahan Pekan Labuhan.
- Kelurahan Tangkahan.
- Kelurahan Nelayan Indah.

2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (WASKON II)

Kasi : La Ode Irfah Firdaus

- Kelurahan Labuhan Deli
- Kelurahan Rengas Pulau I.
- Kelurahan Terjun.

- Kelurahan Tanah 600.
- Kelurahan Paya Pasir.
- Kelurahan Rengas Pulau II
- Mabar (200 Besar)

3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (WASKON III)

Kasi : Martua Frisland Situmorang

- Kelurahan Tanjung Mulia.
- Kelurahan Tanjung Mulia Hilir.
- Kelurahan Mabar.
- Kelurahan Kota Bangun.
- Kelurahan Titi Papan.
- Kelurahan Mabar Hilir.

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (WASKON IV)

Kasi : Erwin Sianipar

- Kelurahan Sicanang.
- Kelurahan Belawan Bahari.
- Kelurahan Belawan Bahagia.
- Kelurahan Belawan I.
- Kelurahan Belawan II.

- Kelurahan Bagan Deli.

Cat: WP bendaharawan Berada di Pengawasan Seksi Wakson IV

2.9. Fungsional Pemeriksa dan Penilai

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional Penilai berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.